**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DALAM PEMBAYARAN HUTANG
(STUDI KASUS DI UD. RUDI GROSIR DAN ECERAN, DESA PUHU)**

Detha Djoni Ariawan, Si Ngurah Ardhya, Ni Ketut Sari Adnyani
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha
Email: detha@undiksha.ac.id , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id ,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk, (1) untuk lebih mengetahui mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran hutang di UD. Rudi Gosir Dan Eceran Desa Puhu, (2) untuk mengetahui mengenai tahap penyelesaian dari tindakan wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran hutang di UD. Rudi grosir dan eceran desa puhu. Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode hukum empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Subjek penelitian ini konsumen dan pelaku usaha UD. Rudi grosir dan eceran desa puhu. Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran hutang, serta lokasi penelitian pada penelitian ini adalah UD. Rudi grosir dan eceran desa puhu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran hutang di UD. Rudi grosir dan eceran belum terlaksana secara maksimal dikarenakan pihak UD. Rudi grosir dan eceran sebagai pelaku usaha belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya dari pihak konsumen serta kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak konsumen. Dan juga hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang mencakup hal itu maupun dari pihak konsumen dan pelaku usaha belum sepenuhnya memahami akan peraturan tersebut, (2) penyelesaian dari tindak wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran hutang di UD. Rudi grosir dan eceran dilakukan secara non litigasi dengan dasar pertimbangan penyelesaian bernegosiasi secara kekeluargaan.

Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Wanprestasi

Abstract

This research aims to, (1) find out more about the implementation of legal protection for business actors due to default by consumers in paying debts at UD. Rudi Gosir and Puhu Village Retail, (2) to find out about the settlement stages of default actions carried out by consumers in paying debts at UD. Rudi wholesale and retail in Puhu village. This type of research uses empirical legal methods. The sample determination technique uses purposive sampling. The subjects of this research are consumers and business actors. Rudi wholesale and retail in Puhu village. The object of this research is legal protection for business actors due to default by consumers in paying debts, and the research location in this research is UD. Rudi wholesale and retail in Puhu village. The data collection techniques used in this research are document study, observation and interviews. The data collected was analyzed qualitatively. The results of this research show, (1) implementation of legal protection for business actors due to default by consumers in paying debts at ud. Wholesale and retail regulations have not been implemented optimally due to UD. Rudi wholesale and retail as business actors have not fully received their rights from consumers and their obligations based on statutory regulations have not been fully implemented by consumers. And this is also due to a lack of understanding regarding the regulations that cover this matter as well as consumers and business actors not yet fully understanding these regulations, (2) resolution of acts of default committed by consumers in paying debts at UD. Wholesale

and retail sales are carried out in a non-litigation manner with the consideration of amicable negotiated settlements.

Keywords: *Consumers, legal protection, Business Actors, default,*

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini Perkembangan perekonomian yang pesat di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa yang ditawarkan baik dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi demikian pada satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena kedudukan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebarnya kebebasan untuk memilih aneka jenis barang atau jasa yang kualitasnya sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen seperti halnya kebutuhan pokok baik sandang, pangan maupun papan (Sinaga, 2001:26).

Setiap berjalanya suatu kegiatan dibidang ekonomi dan Perindustrian tidak bisa luput dari yang namanya transaksi perdagangan. Dalam perdagangan tersebut terdapat yang namanya pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam perekonomian sangat banyak jenis maupun bentuk dari pelaku usaha. Grosir merupakan salah satu bagian dari bentuk pelaku usaha maupun usaha. Adapun grosir adalah Grosir merupakan istilah dalam dunia bisnis atau perdagangan yakni badan usaha yang menjual barang dagangan kepada penjual atau pengusaha lain, misalnya pengecer, pedagang besar, perusahaan industri, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya.

Dalam setiap kegiatan maupun aktivitas perdagangan, hukum menjadi pedoman dalam melakukan Tindakan. Dalam hal tersebut hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan ada berbagai aspek hukum, factor-

faktor terjadinya Tindakan yang menyebabkan hukum itu dipergunakan. Salah satunya yaitu wanprestasi, wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wanndad perbuatan buruk). (Yaman, 2014 :82) Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Yang dimaksud adanya "kesalahan", harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Didalam perundang-undangan sudah diatur terkait wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. dapat dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

Dalam KUHperdata pada Pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Tujuan dibuatnya perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan. Dalam suatu perjanjian tidak luput yang namanya jual-beli yang Dimana dalam jual-beli pasti ada yang namanya perjanjian. Pada Masyarakat luas teransaksi jual beli biasanya dilakukan di berbagai jenis aktivitas

perdagangan Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan pokok tersebut. Kebutuhan pokok sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya adalah sembako dan kebutuhan rumah tangga yang biasa diperjual belikan di pasar tradisional maupun di grosiran. Namun, dewasa ini masyarakat lebih cenderung memilih toko grosiran dan supermarket, supermarket dan grosir sebagai pusat perbelanjaan dikarenakan toko tersebut menjual produk-produk yang lebih lengkap, tata ruang yang rapi, bersih, aman serta nyaman bila dibandingkan dengan pasar tradisional.

pada Pasal 1243 KUH perdata tertuang bahwa setiap penggantian biaya rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Dari Pasal diatas menerangkan bahwa jika si berhutang dikatakan lalai ataupun tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam melakukan suatu perikatan, maka si berhutang wajib untuk memberikan ataupun membayar sesuai dengan perikatan yang sudah disepakati. Jika dilihat dari uraian Pasal tersebut sudah jelas tertera kewajiban para pihak konsumen untuk melakukan yang Namanya pelunasan hutang sesuai nominal belanja konsumen sesuai perikatan yang sudah disepakati. Tapi nyatanya para pihak konsumen masih banyak yang Tidak bisa membayar hutangnya. Kurangnya kesadaran dari pihak konsumen akan wajibnya membayar hutang menjadi kendala bagi pihak pelaku usaha grosir. Dengan demikian jika hutang konsumen menumpuk bisa terjadinya penurunan omset dan juga bisa mengalami kebangkrutan bagi pihak pelaku usaha grosir. Dalam penerapan sistem ini memang bagus diterapkan akan tetapi jika para pihak konsumen terus melakukan hal tersebut maka bisa dikatakan wanprestasi karena para konsumen sudah berjanji akan melunasi hutangnya akan tetapi apabila ditagih selalu mengundur pelunasan hutang tersebut. Dalam melakukan jual beli kerugian tidak dapat dialami oleh pihak konsumen saja. Saat ini, juga pelaku usaha grosir seringkali mengalami kerugian yang disebabkan oleh tidak dilunasinya hutang yang dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha grosir. Seharusnya dalam hal tersebut pihak konsumen melakukan prosedur yang sudah di tetapkan oleh pelaku usaha tersebut agar kedepanya tidak terjadi

wanprestasi prihal hutang konsumen terhadap pelaku usaha.

Ada salah satu pelaku usaha dibidang grosir yang menerapkan sistem hutang ini, toko ini sudah berdiri sejak tahun 2012 di br. Semaon, Desa Puhu, Kec. Payangan, Kab. Gianyar. toko grosir ini bernama UD. Rudi Grosir Dan Eceran. Toko ini menjual barang-barang berupa senck atau ciki-ciki, minuman kemasan ,beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Penerapan sistem hutang sudah sejak lama diterapkan, namun pada saat masa covid-19 sekitar tahun 2020-2021 banyaknya penumpukan hutang yang dilakukan oleh konsumen ke toko grosir ini. Kebanyakan yang melakukan hutang yakni pedagan pengecer atau warung klontong. Yang menyebabkan penurunan omset penjualan dan mengakibatkan barang-barang yang ada ditoko tersebut semakin menipis. dengan hal itu penulis tertarik melakukan penelitian ditoko grosir tersebut. Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan mengenai “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DALAM PEMBAYARAN HUTANG (STUDI KASUS DI UD. RUDI GROSIR DAN ECERAN, DESA PUHU)”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Kajian hukum empiris adalah disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat (Muhaimin, 2020: 80). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (Adnyani, Atmaja & Sudantra, 2022).

Jenis penelitian yuridis empiris mengarahkan peneliti tidak hanya mengandalkan teori hukum, namun juga melakukan pengamatan empiris terhadap faktor-faktor sosial, kultural, dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi hukum

{Adnyani, 2016). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan atau meresponnya (Adnyani, Mandriani & Asrini, 2019).

Metode yuridis empiris berfokus pada pengumpulan data empiris, seperti data yang diperoleh dari pengamatan, survei, wawancara, atau dokumentasi (Adnyani, 2019). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan interpretatif untuk mengevaluasi keefektifan atau efisiensi suatu hukum atau kebijakan (Adnyani, 2021). Analisis data empiris untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum atau meningkatkan efektivitas dari sebuah kebijakan hukum (Adnyani & Purnamawati, 2024).

Sifat dari penelitian hukum ini adalah kualitatif. Dimana, kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya (Zuchri Abdussamad, 2021: 30).

Data Dan sumber Menggunakan data primer dan data sekunder. Bahan hukum penulisan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, bahan skunder terdiri bahan yang didapat secara tidak langsung dari kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang yang diperoleh dari buku- buku literatur, Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan internet, bahan hukum tersier berupa bahan penelitian yang diperoleh dari kamus-kamus, ensiklopedia, leksikona atau dokumen non hukum (misal: statistic, demografi dan lain sebagainya).

Teknik Pengumpulan Data dalam penulisan ini terdiri dari tiga yakni, Observasi, Wawancara dan teknik studi dokumen. Teknik penentuan sampel data dalam penentuan sampel penelitian menggunakan suatu teknik yaitu *nonprobability sampling*. penulis juga menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Teknik pengolahan dan analisis data Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang nantinya akan

dijabarkan dalam rangkaian kata secara sistematis, yang bukan merupakan runtutan angka. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Pembayaran Hutang

Mengacu pada implementasi dalam ruang lingkup hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengukur kemungkinan keberhasilan suatu penerapan dengan mengacu pada penerapan yang sudah di tetapkan sebelumnya. Kalau kita ingin melihat sejauh mana sebuah penerapan kita harus melihat dan memilih target apakah penerapan sudah diterapkan dan terlaksanakan pada target yang kita pilih. Berkaitan dengan implementasi hukum perlu adanya perlindungan hukum jika implementasi hukum tidak terealisasikan dengan memunculkan dampak negatif bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan. Perlindungan hukum itu sendiri adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai Kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya (Philipus , 2014:38).

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang sudah dilakukan kepada saudara rudi selaku pemiliki dari UD. Rudi grosir dan eceran saudari Luh Kerti selaku konsumen yang melakukan sistem hutang dalam pembayaran belanjanya juga sudah melakukan salah satu dari tindak wanprestas. jika dikaitkan dengan teori bentuk-bentuk ingkar janji atau wanprestasi subketi, Luh Kerti sudah melakukan salah satu dari bentuk wanprestasi yakni, melaksanakan apa yang dijanjikanya

tetapi sebagaimana dijanjikannya. Hal ini dikarenakan Luh Kerti tidak menepati pembayaran sesuai nominal hutang yang dilakukannya, hanya saja Luh Kerti hanya mampu membayar setengah dari nominal hutang belanja yang dilakukannya. Jadinya Luh Kerti memang melaksanakan pembayaran yang sudah dijanjikan sebelumnya tetapi pembayaran hutangnya tidak sesuai dengan nominal hutang yang dimiliki oleh Luh Kerti dan hal itu Luh Kerti melakukan salah satu bentuk dari wanprestasi tersebut. Terkait dengan pemaparan wawancara saudara rudi diatas, Luh Kerti termasuk kedalam jenis wanprestasi sebgaiian. Dikarakan Luh Kerti sudah membayar hutang namun setengah dari nominal hutangnya dan juga pembayarannya dilakukan tidak tepat waktu atau terlambat. Dalam perjanjian Luh Kerti termasuk kedalam bentuk perjanjian lisan dikarenakan ada bukti nota tulis dan bukti lisan kapan waktu pembayaran akan dilaksanakan dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan didalam perjanjian.

Dari pemaparan penulis diatas dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang penulis paparkan dalam sistem pembayaran hutang di UD. Rudi grosir dan eceran desa puhu belum sepenuhnya berjalan dengan lancar meskipun ud. Rudi grosir dan eceran melakukan pembebasan hutang. Pembebasan hutang ini yakni, tindakan hukum yang mana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Pembebasan utang yang terjadi atas perbuatan hukum sepihak. Jadi, kreditur menyatakan ke debitur bahwa ia dibebaskan dari utangnya. Pembebasan utang terjadi karena adanya perbuatan hukum timbal balik atau persetujuan. Jadi, pernyataan kreditur yang membebaskan debitur dari utangnya, kemudian debitur menerima pembebasan utang tersebut. Pembebasan hutang ini dilihat dari sisi Luh Kerti yang mana pihak ud. Rudi dalam negosiasinya menghasilkan Luh Kerti hanya membayar setengah dari nominal hutang dan dikatakan sudah lunas jika sudah membayar setengah dari hutang tersebut dari hal itu pihak ud. Rudi grosir telah melakukan pembebasan hutang kepada Luh Kerti. Memang benar pihak ud. Rudi grosir telah melakukan pembebasan hutang tapi Luh Kerti masih dikatakan telah melakukan wanprestasi Dikarakan ada beberapa hak yang tidak didapat oleh pihak UD. Rudi grosir dan eceran

dan beberapa peraturan yang belum berjalan sesuai dengan apa semestinya dijalankan sehingga pihak UD. Rudi grosir dan eceran mengalami beberapa kerugian karanan hal tersebut. Dan jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1238 yang menyatakan bahwa : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dengan pernyataan pasal tersebut juga sebagai dasar bahwa Ibuk Nia dan Luh Kerti masih dianggap melakukan wanprestasi dikarenakan kedua konsumen tersebut telah lalai dalam menjalani kewajiban dalam membayar hutang kepada pihak ud. Rudi grosir dan eceran. Dan juga para pelaku usaha UD. Rudi grosir dan eceran meskipun sudah terjadinya pelepasan hutang dan juga pihak dari pelaku usaha masih kurang mengetahui adanya peraturan yang mengikat atas hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kurangnya pemahaman terkait peraturan tersebut menjadi kendala bagi pihak UD. Rudi grosir dan eceran sehingga membuat konsumen melakukan wanprestasi.

Dan jika dilihat dari sisi konsumen yang sudah penulis wawancarai dan dikaitkan dengan peraturan yang sudah penulis terangkan masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dikarakan dalam hal tersebut para pihak konsumen masih melanggar hak dari konsumen serta masih belum maksimal dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan yang sudah penulis terangkan dan mengakibatkan terjadinya indikasi wanprestasi. Kurangnya pemahaman akan pemenuhan kewajiban atas hak pelaku usaha serta kurangnya pemahaman terkait peraturan perundang-undangan menjadi alasan konsumen melakukan tindakan berupa ingkar janji yang membuat pihak UD. Rudi grosir dan eceran mengalami beberapa kerugian. Dan juga kurangnya pengenalan terkait peraturan maupun hak dari konsumen maupun pelaku usaha melalui sosialisasi langsung ke masyarakat oleh pihak lembaga yang menaungi dibidang konsumen maupun pelaku usaha seperti Lembaga perlindungan swadaya masyarakat (LPKSM). Hal tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman akan hak maupun peraturan yang terkait dengan konsumen dan pelaku usaha.

Penyelesaian Dari Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Pembayaran Hutang Di UD. Rudi Grosir Dan Eceran Desa Puhu

Dalam suatu tindak wanprestasi jika permasalahannya agar tidak terlalu berlarut-larut perlu adanya sebuah penyelesaian. Penyelesaian ini bertujuan agar kedepannya pihak yang terlibat tidak berkonflik satu sama lain. Penyelesaian dari tindak wanprestasi dibagi menjadi 2 yakni non litigasi dan litigasi. Adapun secara non litigasi dibagi menjadi empat yakni:

a. Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak. Arbitrase digunakan sebagai cara untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan perselisihan secara konkret, final, dan mengikat. Istilah arbitrase berasal dari berbagai bahasa seperti Arbitration (Latin), Arbitration (Belanda/Perancis), Arbitration (Inggris), dan Arbitration (Jerman), yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu melalui arbiter atau wasit. Arbitrase digunakan untuk mengatasi sengketa yang berkembang atau sulit diselesaikan melalui perundingan/konsultasi atau melibatkan pihak ketiga, serta untuk menghindari penyelesaian sengketa yang memakan waktu di lembaga peradilan.

b. Negosiasi

sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses berunding dengan pihak lain untuk mencapai solusi atau penyelesaian atas masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Negosiasi adalah cara paling sederhana dan ekonomis untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, seringkali pihak-pihak yang bersengketa gagal dalam negosiasi karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam teknik negosiasi

yang baik.(Susanti adi Nugroho, 2009:21).

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya melibatkan berunding dengan bantuan pihak ketiga yang berpengalaman dalam proses mediasi yang efektif dan dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan dalam situasi konflik untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam negosiasi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan bertindak sebagai fasilitator dalam dialog antara para pihak dalam lingkungan terbuka. Kejujuran dan pertukaran pendapat penting dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah metode yang berkaitan dengan mediasi. Dalam konsiliasi, mediator berperan sebagai wasit. Dalam hal ini, arbiter mengambil peran yang lebih aktif dengan menemukan beberapa bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak mencapai kesepakatan, solusi yang diusulkan oleh arbiter akan menjadi solusi yang mengikat dan final bagi para pihak. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan dan pihak ketiga memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa, proses ini dikenal sebagai arbitrase. Salah satu perbedaan antara mediasi dan arbitrase terletak pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada para pihak yang bersengketa. Hanya dalam arbitrase terdapat rekomendasi yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa, sedangkan dalam mediasi, mediator hanya berupaya membawa para pihak untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, beberapa bentuk arbitrase melibatkan intervensi yang lebih dalam (lebih kompulsif) dan aktif oleh pihak ketiga, mengasumsikan adanya norma-norma tertentu, dan memiliki

orientasi pendidikan untuk satu atau lebih orang yang terlibat dalam sengketa.

Adapun penyelesaian yang kedua yakni Penyelesaian Secara Litigasi yaitu :

Prosedur penyelesaian sengketa yudisial, yang sering disebut sebagai "litigasi", merujuk pada cara penyelesaian sengketa melalui proses peradilan di mana hakim memegang peran penting dalam mengatur dan memutuskan. Litigasi melibatkan berbagai pihak yang bersengketa yang saling berhadapan di pengadilan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Putusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan menunjukkan pihak yang menang dalam sengketa tersebut. Prosedur penyelesaian sengketa ini memiliki ciri-ciri formal dan teknis, menghasilkan situasi kemenangan-kalah, seringkali memunculkan masalah baru, memakan waktu lama, mahal, kurang responsif, dan bisa menciptakan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, masyarakat mulai mencari alternatif lain dalam penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dikenal dengan istilah "alternative dispute resolution" atau ADR. Tidak ada definisi yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan mengenai litigasi. Namun, dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase terdapat penjelasan bahwa sengketa dalam konteks perdata dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan itikad baik, dengan menghindari proses litigasi di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam mengajukan gugatan maupun memberikan jawaban untuk membantah gugatan tersebut. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merujuk pada upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan.

Dengan adanya jenis-jenis dari penyelesaian permasalahan wanprestasi diatas, maka mempermudah jalanya proses dari penyelesaian tersebut. Berkaitan dengan hal itu dalam permasalahan yang dialami oleh pihak UD. Rudi grosir terhadap wanprestasi yang dilakukan konsumen perlu yang namanya

penyelesaian agar kedepannya tidak terjadi permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan kepada pihak UD. Rudi grosir dan eceran selaku pelaku usaha serta Ibuk Nia dan Luh Kerti sebagai konsumen.

hal yang dilakukan oleh pihak UD. Rudi grosir dan eceran maupun dari pihak konsumen untuk mencari sebuah penyelesaian dari sebuah permasalahan wanprestasi ini yakni, bahwa pihak UD. Rudi grosir melakukan negosiasi dengan cara kekeluargaan terhadap Ibuk Nia dan Luh Kerti selaku pihak konsumen dengan menghasilkan kesepakatan berupa bertanggung jawab dengan membayar hutang sesuai dengan nominal hutang terdahulunya dengan jarak waktu 1 bulan paling lama untuk konsumen dari sisi Ibuk Nia dan memberi keringanan pembayaran hutang dengan catatan alasan yang jelas dan memunculkan kesepakatan Luh Kerti membayar setegah dari nominal hutang terdahulunya. Jika dikaitkan dengan pasal 1243 KUH perdata Ibuk Nia dan Luh Kerti memang sudah mampu bertanggung jawab atas hak yang belum di dapat oleh pihak UD. Rudi grosir dan eceran namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan hak yang belum didapatkan oleh pelaku usaha dan sesuai dengan pasal 1243 KUH perdata.

Jika dilihat dari hukum positif makan penyelesaian dari tindak wanprestasi dalam pembayaran hutang yang dilakukan oleh pihak konsumen terhadap UD. Rudi grosir dan eceran desa puhu dengan perjanjian tidak tertulis diselesaikan dapat dikategorikan secara non litigasi dengan dasar pertimbangan penyelesaian bernegosiasi secara kekeluargaan. Sesuai dengan teori Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses berunding dengan pihak lain untuk mencapai solusi atau penyelesaian atas masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Negosiasi adalah cara paling sederhana dan ekonomis untuk menyelesaikan perselisihan (adi Nugroho, 2009:21). Jadi penyelesaian dari permasalahan yang dialami UD. Rudi grosir dan eceran dapat diselesaikan dengan cara negosiasi secara kekeluargaan dan dapat dikategorikan ke jenis penyelesaian non litigasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah peneliti laksanakan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terkait perundang-undangan yang mencakup perlindungan hukum bagi UD. Rudi grosir sebagai pelaku usaha belum terlaksanakan atau terimplementasikan secara baik. Hal tersebut dikarenakan pihak UD. Rudi grosir dan eceran sebagai pelaku usaha belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya dari pihak konsumen meskipun pihak ud. Rudi telah melakukan pembebasan terhadap sisa hutang sehingga kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak konsumen. Dan juga hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang mencakup hal itu maupun dari pihak konsumen usaha belum sepenuhnya memahami akan peraturan tersebut.
2. Bentuk penyelesaian akibat dari wanprestasi terkait pembayaran hutang yang dilakukan konsumen di UD. Rudi grosir dan eceran desa puhu dengan dikategorikan secara non litigasi berdasarkan hukum positif, dengan dasar pertimbangan negosiasi secara kekeluargaan antar pihak UD. Rudi grosir dan eceran desa puhu selaku konsumen dengan pihak konsumen dengan menghasilkan bentuk pertanggungjawaban membayar hutang sesuai nominal terdahulunya dengan waktu paling lama satu bulan dan dengan membayar setengah nominal hutang terdahulunya dengan catatan alasan yang pasti.

Saran

1. Bagi pelaku usaha yakni UD. Rudi grosir dan eceran desa puhu dalam menerapkan sistem hutang ud. Rudi grosir dan eceran harus lebih selektif dalam memberi piutang kepada konsumen. Jika lebih selektif dalam memberi piutang maka hal yang membuat keterlambatan pembayaran hutang bisa lebih di minimalis. Dan punlis menyarankan agar memiliki tukang tagih kusus dalam pembayaran hutang agar lebih teratur konsumen dalam melakukan pembayaran. Serta pelaku usaha UD. Rudi grosir dan eceran desa puhu harus lebih

memperhatikan peraturan perundangan yang melindungi dirinya agar kedepannya seumpamanya jikalau ada kasus seperti ini yang merugikan lebih besar supaya memiliki perlindungan hukum dan bisa menuntut hak nya keranah hukum.

2. Bagi konsumen yang melakukan pembayaran belanja secara hutang di UD. Rudi grosir dan eceran agar memiliki rasa itikad baik dalam melakukan pelunasan hutang secara tepat waktu baik itu berupa kesadaran akan kewajibanya dalam pembayaran hutang maupun hal-hal yang harus dijalankan secara beritikad baik kepada pelaku usaha ud. Rudi grosi dan eceran dan para konsumen harus lebih memperhatikan serta memahami tentang peraturan terutamanya yang menyangkut pelaku usaha maupun konsumen agar kedepanya mengetahui kewajiban sebagai konsumen dan melaksanakan kewajibanya serta seumpamanya pelaku usaha tidak dapat memenuhi hak dari konsumen bisa menagih hak kembali kepada pelaku usaha dan juga para pihak konsumen di masyarakat perlu adanya pembelajaran pemahaman akan tidak hanya pihak konsumen yang memiliki hak akan tetapi para pihak pelaku usaha juga memiliki haknya dengan mengikuti pembelajaran melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga LPKSM yang menaungi terkait konsumen maupun pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: Syakir Media Press
- 2) Muhaimin, 2020. "Metode Empiris", Jakarta : Gramedia Blog.
- 3) Philipus , 2014 . Implementasi Hukum Indonesia, Yogyakarta : Balai Pustaka.
- 4) Susanti Adi Nugroho, 2009, " Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta : Kencana" .
- 5) Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan.jakarta :Prenadamedia Group.

JURNAL

- 6) Adnyani, N. K. S. (2016). Cooperative performance measurement as an efforts In supporting microfinance institutions business development (Viewed from the Perspective Of Law No. 1 Year 2013. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 9(4), 30-37.
- 7) Adnyani, N. K. S. (2019, January). Food Security Based on Pancasila Economic Democracy. In *International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2018)* (pp. 112-116). Atlantis Press.
- 8) Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- 9) Adnyani, N. K. S. (2021). Legal Instruments for Control of Sustainable Tourism Investment in Bali from Citizenship Ecological Perspective. *International Journal of Community Service Learning*, 5(4), 333-341.
- 10) Adnyani, N. K. S., Atmaja, G. M. W., & Sudantra, I. K. (2022). Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective. *International Journal of Social Science and Business*, 6(1), 120-127.
- 11) Harefa, Stepanus, Dicko, Billy. 2016. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)". *Privat Law* Volume 4 Nomor 2 (hlm. 117)
- 12) Kusumayanti, Hazar. 2020. "Perkembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual". *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 3 Nomor 2 (hlm. 297)
- 13) Lubis, Hidayat, Tufik. 2022. "Hukum Perjanjian Di Indonesia ". *Jurnal Sosek*. Volume 2 Nomor 3 (hlm. 177)
- 14) Melawati. 2021. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli". *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* Volume 3 Nomor 1 (hlm. 14)
- 15) Mondoring, F. Johanis. 2023. " Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjualan Dan Pembelian Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata". *Lex Privatum* Volume 12 Nomor 3 (hlm. 4)
- 16) Riansyah, Ahmad. 2022. " Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah". *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1 Nomor 2 (hlm. 70)
- 17) Sinaga, Anita, Nirul. 2018. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum* Volume 7 Nomor 2 (hlm. 117)
- 18) Syamsiah, Desi. 2021. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian". *Jip* Volume 2 Nomor 1 (hlm. 329)
- 19) Umar, Utari, Dahlia. 2020. " Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata". *Lex privatum* Volume 7 Nomor 1 (hlm. 39)
- 20) Utama, Adi, Angga, I Gede. 2019. " Asas Pacta Sunt Servada Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional". *Ganesa Civic Education Journal* Volume 1 Nomor 1 (hlm. 42).

PERUNDANG-UNDANGAN

- 21) Undang-Undang Dasar 1945
- 22) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 23) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara 1999 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Nomor 3821).